

TINGKAT KESESUAIAN PERAN WISATA KAWASAN SANGIRAN SEBAGAI WISATA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN KOMPONENNYA

Vemi Asa Hardini, Murtanti Jani Rahayu, Winny Astuti*

(*Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Abstrak

Kawasan Sangiran adalah kawasan cagar budaya yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia budaya dengan nama *Sangiran The Early Man Site* (1996). Pengembangan Sangiran sebagai cagar budaya melihat pada nilai penting yang terkandung di dalamnya, yaitu pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pariwisata. Peran ini diharapkan berjalan agar informasi sejarah dapat tersampaikan kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk wisata. Penelitian tentang kesesuaian peran wisata Kawasan Sangiran sebagai wisata cagar budaya dilakukan pada keempat klaster Museum Sangiran, yaitu klaster Krikilan, klaster Ngebung, klaster Bukuran, klaster Manyarejo, dan klaster Dayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen peran wisata cagar budaya dan menganalisis tingkat kesesuaian komponen peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran. Pengambilan data dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara dan kuesioner, sementara analisis data menggunakan metode skoring masing-masing komponen peran wisata cagar budaya. Hasil analisis keseluruhan komponen peran wisata cagar budaya menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran adalah kurang. Lima komponen bernilai kurang sesuai yaitu komponen pemanfaatan daya tarik wisata, motivasi wisata, fasilitas pelayanan wisata, aksesibilitas, dan kelembagaan pengelola. Sementara komponen yang bernilai sesuai adalah komponen kebijakan. Keenam komponen peran wisata tersebut sudah berjalan dalam pengelolaan wisata dan pelestarian di Kawasan Sangiran, namun belum

berjalan dengan maksimal. Pengelolaan secara terpadu, terutama pengelolaan wisata, antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen perlu segera dilakukan agar peran wisata cagar budaya dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat berjalan secara maksimal.

Kata kunci: Sangiran, pariwisata cagar budaya, kesesuaian, peran wisata

Suitability of Sangiran Tourism Role as Heritage Tourism Based on its Components

Abstract

Sangiran Man Site is an heritage site that has been appointed by UNESCO as world heritage and named with Sangiran The Early Man Site. Sangiran development as heritage site is based on it important values in education, knowledge, and tourism. This role is expected occur well in order to give some historical information to public in tourism way. Research about suitability of heritage tourism roles has been impelented in four Clusters of Sangiran Museum, that is Krikilan Cluster, Ngebung Cluster, Bukuran Cluster, and Dayu Cluster. This research aims to identify the component of heritage tourism and analyse the rank of Sangiran's heritage tourism role suitability. Data collection was performed by interviewing and distributing questionnaires. And the analysis use scoring metode from each component of heritage tourism role. The result shows that all component is less suitable. Five components which is less suitable are the use of tourist attraction, travel motivation, tourism facilities, accessibility, and the tourism institution. The component which is suitable is the policy. The six components has implemented in tourism development, but it still not work optimal. The integrated development is needed, mainly in tourism between Karanganyar and Sragen region, so the roles of heritage tourism will occur optimally to give people education and knowledge about human evolution.

Keywords: Sangiran, heritage tourism, suitability, tourism role

I. Pendahuluan

Kawasan Sangiran adalah kawasan cagar budaya yang dikenal dengan kekayaan benda purbakala yang ditemukan pertama kali oleh von Koenigswald pada tahun 1934. Awalnya, fosil atau *balung buto* belum dianggap berharga oleh masyarakat hingga von Koenigswald menerapkan sistem upah kepada masyarakat. Lambat laun, masyarakat sadar bahwa *balung buto* merupakan barang berharga dan akan mendatangkan keuntungan yang besar jika dijual. Akibatnya pencarian fosil untuk dijual secara ilegal marak terjadi pada saat itu.

Sebagai upaya perlindungan atas nilai penting Kawasan Sangiran, UNESCO menetapkan Kawasan Sangiran sebagai kawasan warisan dunia dengan nama *Sangiran The*

Early Man Site pada 1996. Pada tahun 2011 mulai dibangun empat klaster museum dengan perannya masing-masing. Klaster Krikilan adalah museum yang menjadi pusat pengunjung utama, Klaster Ngebung merupakan museum yang menjelaskan sejarah penemuan Situs Sangiran, Klaster Bukuran memberikan informasi tentang evolusi manusia, dan Klaster Dayu menyajikan informasi tentang penelitian terbaru dan penelitian lapangan yang dilakukan sampai saat ini. Klaster Bukuran memiliki satu museum lapangan, yaitu Museum Manyarejo, yang menyajikan penelitian arkeologi di Situs Sangiran.

Yadi Mulyadi dalam Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa pemanfaatan cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari konteks pelestarian cagar budaya. Salah satu cara pelestarian cagar budaya adalah dengan menjadikannya *living monument* melalui pengembangan pariwisata. Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam penyediaan toko cinderamata dan munculnya industri rumah tangga yang mengolah kerajinan batuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, selain bertani. Namun kesempatan ekonomis bagi masyarakat ini justru menjadi dampak negatif bagi pelestarian karena adanya peningkatan eksploitasi batuan (bahan souvenir) yang dilakukan oleh penduduk setempat.

Keberadaan tanah lahan Situs Sangiran yang dimiliki secara sah oleh penduduk setempat bukan berarti tidak boleh dijual, melainkan penggunaan lahannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Sebagai destinasi wisata cagar budaya bertaraf internasional, frekuensi transportasi yang tersedia adalah satu hari sekali pergi-pulang yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dalam mengangkut barang dagangan. Sementara untuk mengakses empat klaster museum tersebut pengunjung menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan sewa karena belum ada transportasi umum yang tersedia secara padu.

Sebagai kawasan cagar budaya tingkat dunia, Pemerintah Pusat maupun Daerah telah menyediakan dana yang tidak sedikit. Pengembangan kawasan sebagai tujuan wisata edukasi alternatif juga telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Namun, jumlah pengunjung belum sebanyak pengunjung di destinasi wisata lainnya.

Beberapa permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesesuaian peran Kawasan Sangiran sebagai

wisata cagar budaya yang berperan besar dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, pemerintah, dan masyarakat secara luas berdasarkan komponennya?

II. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses pengkajian teori-teori yang mendasari sebuah penelitian. Penelitian kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran ini didasari oleh teori terkait komponen wisata, teori cagar budaya, teori komponen peran wisata cagar budaya, dikaitkan sebagai dasar teori dalam penelitian kesesuaian peran wisata cagar budaya ini.

Komponen wisata cagar budaya terdiri dari (1) kebijakan, dimana jika kebijakan berupa peraturan ruang dan peraturan zonasi, serta perangkat kebijakan yang lain dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka zonasi kawasan dan penempatan fasilitas akan bersesuaian antara rencana dengan implementasinya. (2) Destinasi wisata tidak bisa terlepas dari daya tarik, baik itu berupa daya tarik wisata fisik dan non-fisik. Daya tarik dapat berupa peninggalan purbakala dan museumnya, yang didukung dengan adanya upacara/adat istiadat, kampung tematik, festival, penelitian, dan pameran. (3) Motivasi wisata dapat berupa pendidikan dan penelitian, rekreasi, kesehatan, olahraga, keluarga, MICE, sosial politik, keamanan, permukiman, dan keagamaan. (4) Fasilitas yang harus tersedia di destinasi wisata antara lain MCK/toilet, mushola, rumah makan/restoran, toko kelontong, sarana komunikasi, bank/atm, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, pom bensin/stasiun BBM, dan akomodasi. Untuk menunjang wisata cagar budaya, fasilitas yang dibutuhkan adalah museum, toko cinderamata, sarana informasi dan promosi seperti TIC, brosur, buku panduan, iklan, paket wisata, kalender wisata, dan promosi budaya lokal. (5) aksesibilitas dapat dilihat dari ketersediaan sarana transportasi dan daya hubung transportasi yang tersedia. Pelibatan *stake holder* seperti (6) pemerintah, masyarakat, dan swasta diharapkan dapat memaksimalkan peran-peran wisata cagar budaya.

Pelestarian secara fisik sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Inskeep (2000), "*...is that it (tourism) can be a significant vehicle for achieving conservation of the environmental and cultural heritage of an area that, without tourism, might not be financially feasible or politically acceptable to accomplish.*" bahwa pariwisata dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat. (Soebadio, 2002)

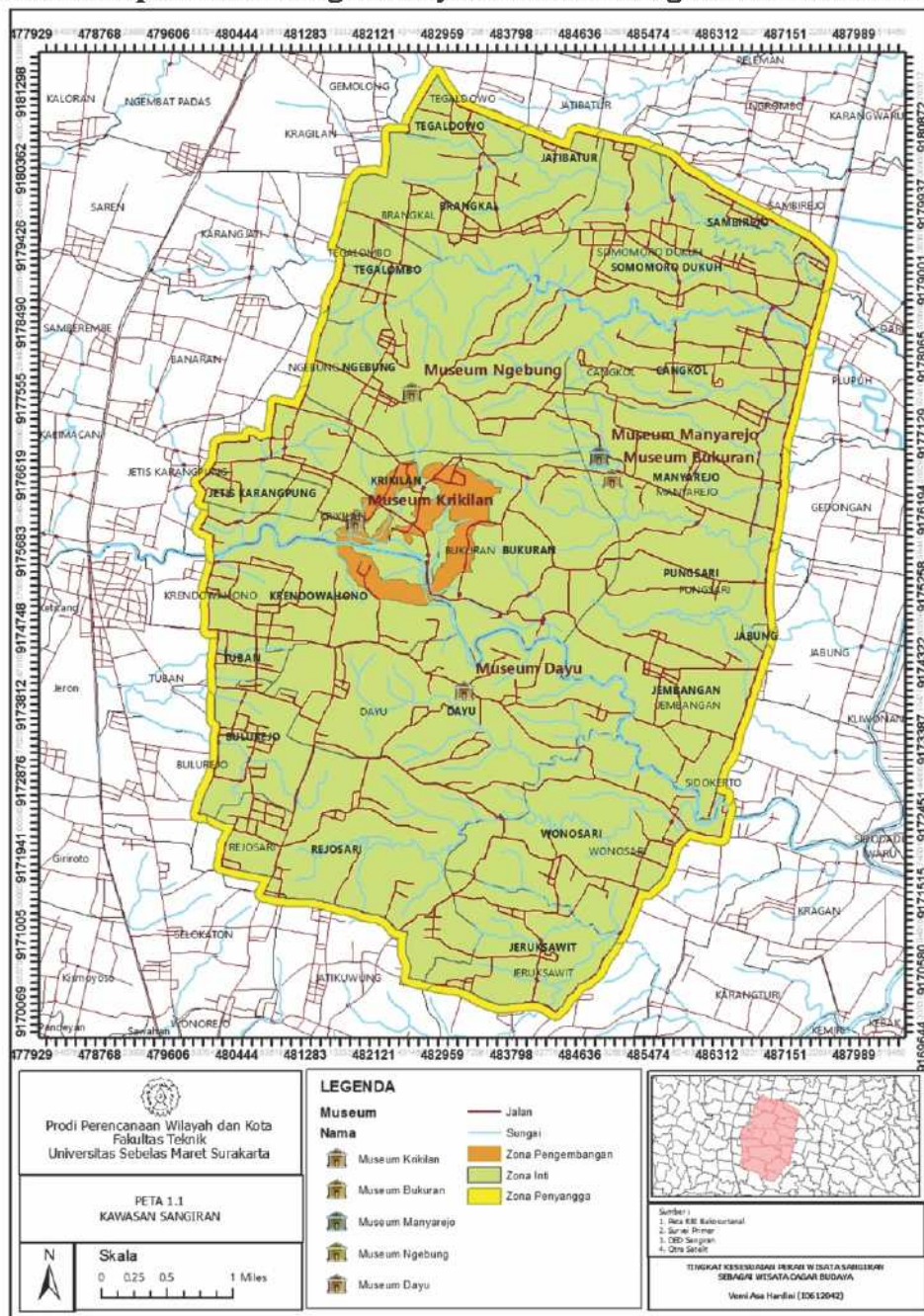
Hewison dalam Hall (1999) menyebut bahwa, "*Di seluruh dunia peninggalan sejarah dan pariwisata mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Pariwisata*

digunakan sebagai alasan ekonomi untuk pelestarian warisan, juga membantu pelestarian artefak dan kehidupan rakyat di mata wisatawan.”

III. Metode Penelitian

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kawasan Sangiran yang berada di wilayah 24 desa pada empat kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen dengan luas 59,21 km². Ruang lingkup substansi penelitian adalah membahas tingkat kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran berdasarkan komponennya.



Gambar 1.
Peta Kawasan Sangiran

B. Metode Pengambilan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan variabel yang spesifik, jelas, dan rinci sebagai pegangan dalam proses pencarian data hingga proses analisis. Hasil penelitian kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi disertai penjelasan mendasar (justifikasi) secara rinci dan terukur sesuai dengan variabel yang dirumuskan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut untuk ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono 2012, 38). Variabel dapat berupa atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang menjadi fokus peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Variabel	Sub Variabel	Parameter
Kebijakan	Pembagian zona secara tegas	Luas tutupan lahan
	Kelengkapan komponen kebijakan	Jumlah fasilitas pada zona inti Kelengkapan komponen kebijakan
Pemanfaatan Daya Tarik Wisata	Daya tarik fisik untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan	Objek penelitian Daya tarik fisik sbg daya tarik wisata
	Daya tarik fisik non-fisik untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan	Objek penelitian Daya tarik non-fisik sbg daya tarik wisata
Motivasi wisata	Motivasi wisata untuk ilmu pengetahuan dan penelitian	Jika wisatawan/pengunjung : - Melakukan penelitian - Berkunjung ke pameran - Mengikuti pelatihan/penyuluhan/sosialisasi - Studi keiling museum
Fasilitas pelayanan wisata cagar budaya	MCK	Ketersediaan fasilitas
	Mushola/fasilitas ibadah	Ketersediaan fasilitas
	Rumah makan/restoran	Ketersediaan fasilitas
	Toko kelontong	Ketersediaan fasilitas
	Bank/ATM	Ketersediaan fasilitas
	Sarana kesehatan	Ketersediaan fasilitas
	Pom bensin/stasiun BBM	Ketersediaan fasilitas
	Akomodasi	Ketersediaan fasilitas
	Sarana komunikasi	Kelancaran komunikasi
	Sarana keamanan	Ketersediaan sarana keamanan
	Toko cinderamata/museum shop	Ketersediaan fasilitas Penguatan identitas lokal
	Koleksi museum	Jenis koleksi
	Sarana promosi dan informasi	Ketersediaan sarana promosi dan informasi wisata Promosi bermuatan edukasi & identitas lokal
	Sarana perlindungan koleksi	Ketersediaan sarana perlindungan untuk pelestarian koleksi cagar budaya
	Bangunan penunjang	Ketersediaan bangunan penunjang museum untuk menunjang pariwisata
Aksesibilitas	Sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi
Kelembagaan Wisata Cagar Budaya	Masyarakat setempat	Daya hubung
		Keterlibatan dalam lembaga
		Keterlibatan sebagai tenaga kerja
	Pemerintah	Keterlibatan dalam penyediaan fasilitas
		Keterlibatan dalam pemangana tanaman
Swasta	Peran Pemerintah Investasi dan dukungan sarana prasarana	

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi lapangan yang digunakan untuk mengetahui sebaran dan kondisi fasilitas pelayanan wisata dan aksesibilitas kawasan. Untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan daya tarik, kebijakan, aksesibilitas kawasan, dan kelembagaan metode yang digunakan adalah wawancara.

Tabel 1.
Variabel dan Subvariabel Penelitian

Sumber: Penulis 2016

Sementara untuk mengetahui motivasi wisata pengunjung digunakan kuesioner.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *probability sampling* berupa *proportionated stratified random sampling* yang diambil dari anggota/unsur populasi secara acak berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah pengunjung sudah berkunjung ke lima museum di empat klaster Museum Sangiran.

Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin (1990) yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

di mana:

n = Jumlah sampel

$$n = \frac{46.768}{46.768 \times (0,1)^2 + 1}$$

$$= 99,8 \text{ orang}$$

$$= 99,8 \text{ orang}$$

Sebaran sampel pengunjung Kawasan Sangiran dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Sampel Pengunjung

Klaster	Jumlah Sampel
Krikilan	62
Dayu	16
Bukuran	13
Manyarejo	4
Ngebung	5
Total Sampel	100

Sumber: Penulis 2016

D. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis skoring yang membagi masing-masing variabel dalam bobot yang sama untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing variabel dalam analisis kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran.

Untuk penilaian terhadap tiap aspek atau tiap variabel, digunakan nilai sebagai berikut:

$$\text{interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{3}$$

$$= \frac{18 - 5,64}{3} = 4,12$$

Tabel 3. Interpretasi Hasil Tingkat Kesesuaian Berdasarkan Hasil Skoring

No.	Kategori	Interval Nilai	Keterangan
1.	Sesuai	13,89-18,00	Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 13,90-18,00, maka nilai tersebut masuk pada kategori sesuai yang artinya Kawasan Sangiran sudah memiliki peran yang sesuai sebagai wisata cagar budaya.
2.	Kurang sesuai	9,77-13,88	Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 9,79-13,89, maka nilai tersebut masuk pada kategori kurang sesuai yang artinya Kawasan Sangiran belum memiliki peran yang sesuai sebagai wisata cagar budaya dan perlu ada perbaikan pada komponen peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran
3.	Tidak sesuai	5,67-9,76	Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 5,67-9,78, maka nilai tersebut masuk pada kategori tidak sesuai yang artinya Kawasan Sangiran tidak memiliki peran yang sesuai sebagai wisata cagar budaya

Sumber: Penulis 2016

IV. Hasil Penelitian

Kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran akan dilihat berdasarkan kesesuaian arahan kebijakan, daya tarik, motivasi wisata, ketersediaan fasilitas, ketersediaan transportasi, dan keterlibatan lembaga pengelola. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil penelitian mengenai kesesuaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran.

Dari hasil skoring keenam variabel penelitian berupa kebijakan, pemanfaatan, motivasi wisata, fasilitas pelayanan wisata, aksesibilitas, dan kelembagaan

Sumber:
Analisis Penulis 2016

Tabel 4 Hasil Analisis Skoring Komponen Peran Wisata Cagar Budaya di Kawasan Sangiran

Variabel	Sub Variabel	Parameter	Hasil Penelitian
Kebijakan	Pembagian zona secara tegas	Luas tutupan lahan	Sedang
	Kelengkapan komponen kebijakan	Jumlah fasilitas pada zone inti Kelengkapan komponen kebijakan	Sedang Tinggi
Pemanfaatan Daya Tarik Wisata	Daya tarik fisik untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan	Objek penelitian Daya tarik fisik sbg daya tarik wisata	Sedang Tinggi
	Daya tarik fisik non-fisik untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan	Objek penelitian Daya tarik non-fisik sbg daya tarik wisata	Rendah Sedang
Motivasi wisata	Motivasi wisata untuk ilmu pengetahuan dan penelitian	Jika wisatawan/pengunjung : - Melakukan penelitian - Berkunjung ke pameran - Mengikuti pelatihan/penyuluhan/sosialisasi - Studi keliling museum	Sedang
Fasilitas pelayanan wisata cagar budaya	MCK	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Mushola/fasilitas ibadah	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Rumah makan/restoran	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Toko kelontong	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Bank/ATM	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Sarana kesehatan	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Pom bensin/fasilitas BBM	Ketersediaan fasilitas	Rendah
	Akomodasi	Ketersediaan fasilitas	Tinggi
	Sarana komunikasi	Ketersediaan fasilitas	Rendah
		Kelancaran komunikasi	Sedang
	Sarana keamanan	Ketersediaan sarana keamanan	Sedang
	Toko cendermata/museum shop	Ketersediaan fasilitas	Tinggi
		Pengusahan identitas lokal	Tinggi
	Koleksi museum	Jenis koleksi	Sedang
		Ketersediaan sarana promosi dan informasi wisata	Sedang
	Sarana promosi dan informasi	Promosi bermuatan edukasi & identitas lokal	Sedang
	Sarana perlindungan koleksi	Ketersediaan sarana perlindungan untuk pelestarian koleksi cagar budaya	Tinggi
Bangunan penunjang	Ketersediaan bangunan penunjang museum untuk menunjang pariwisata	Tinggi	
Aksesibilitas	Sarana transportasi	Ketersediaan sarana transportasi	Sedang
	Daya hubung	Daya hubung	Sedang
Kelembagaan Wisata Cagar Budaya	Masyarakat setempat	Keterlibatan dalam lembaga	Sedang
		Keterlibatan sebagai tenaga kerja	Tinggi
		Keterlibatan dalam penyediaan fasilitas	Tinggi
		Keterlibatan dalam pengemaran temuan	Sedang
	Pemerintah	Peran Pemerintah	Tinggi
Swasta	Investasi dan dukungan sarana prasarana	Rendah	

pengelola, diketahui bahwa kesesuaian pencapaian peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran secara keseluruhan adalah kurang sesuai.

Tabel 5. Skoring Tingkat Kesesuaian Peran Wisata Cagar Budaya

No.	Variabel	Nilai Skoring	Kategori
1.	Kebijakan	2,5	Sesuai
2.	Pemanfaatan daya tarik wisata	2	Kurang sesuai
3.	Motivasi wisata	2	Kurang sesuai
4.	Fasilitas pelayanan wisata	1,83	Kurang sesuai
5.	Aksesibilitas	2	Kurang sesuai
6.	Kelembagaan pengelola	2,17	Kurang sesuai
Jumlah		12,5	Kurang sesuai

Sumber: Analisis Penulis 2016



Gambar 2. Diagram Hasil Skoring

V. Pembahasan

Nyoman S. Pendit (1999, 2) mendeskripsikan kepariwisataan sebagai suatu keseluruhan dan juga termasuk di dalamnya unsur-unsur yang terlibat secara rinci, termasuk karakteristik, kedudukan, fungsi dan peran, dan sifat dinamika hubungannya. Cagar budaya memiliki nilai penting dan peran bagi kepentingan agama, sosial, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata. Pemanfaatan cagar budaya sendiri didasarkan pada kandungan nilai penting tersebut.

Peran kebijakan berjalan dilihat dari dua hal yaitu pembagian zonasi secara tegas dan adanya kelengkapan komponen kebijakan. Pembagian zonasi secara tegas dilihat dari indikator luas tutupan lahan dan jumlah fasilitas pada zona pengembangan. Sebagai kerangka acuan

pelaksanaan pengembangan wisata dan pelestarian kawasan dibutuhkan kebijakan yang terpadu. Bisa berupa seperangkat SOP (standar operasional prosedur) dan peraturan tata ruang seperti rencana tata ruang, *DED (detail engineering design)*, dan *masterplan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan sudah sesuai berdasarkan luas lahan terbangun di zona inti, jumlah fasilitas di zona pengembangan, dan kelengkapan komponen kebijakan.

Upaya pemanfaatan nilai penting dan peran Cagar Budaya adalah dengan mengadakan kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, geologi, paleantropologi, fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan kajian pendidikan (Mulyadi, 2014). Hasil penelitian-penelitian tersebut dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, geologi, biologi, sosiologi, planologi, arsitektur, maupun kajian pendidikan. Namun dengan adanya berbagai penelitian tersebut, baik oleh akademisi maupun pengelola museum (BPSMP Sangiran), belum ada pusat penelitian (*research center*) di Kawasan Sangiran.

Aksesibilitas dalam konteks penelitian ini adalah tentang ketersediaan sarana transportasi dan daya hubung dari moda transportasi yang tersedia. Kawasan pariwisata memerlukan ketersediaan fasilitas transportasi lokal untuk meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Warpani (2007) menjelaskan bahwa tidak ada perangkutan yang secara khusus diadakan untuk pariwisata. Meski demikian, destinasi wisata memerlukan moda transportasi umum yang terhubung dengan angkutan antarkota dan angkutan perangkutan sebab perangkutan adalah sebuah sistem yang tidak dapat berdiri sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 91% pengunjung menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju kawasan, berupa motor atau mobil. Sementara 9% sisanya menggunakan kendaraan sewa berupa bus, minibus, atau taksi. Tidak terdapat moda transportasi umum menuju dan keluar kawasan. Salah satu alasan tidak terdapat moda transportasi umum adalah peraturan zonasi kawasan Sangiran yang melarang adanya pengembangan pembangunan di Zona I kawasan. Dibukanya jalur transportasi umum dikhawatirkan akan mengundang berkembangnya guna lahan baru di kawasan tersebut yang mengancam aktivitas pelestarian kawasan. Meski demikian, kawasan Sangiran masih dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan sewa.

Kelembagaan adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya terkait manajemen pengelolaan pariwisata. Bambang Sunaryo (2013, 31) mengatakan paling tidak komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan ada tiga, yaitu

pemerintah, industri atau swasta, dan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya berkaitan dengan komponen kelembagaan, masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat setempat dalam menyediakan fasilitas pelayanan wisata berupa toko cinderamata, rumah makan, akomodasi, toilet/MCK, dan toko kelontong. Sebanyak 97,3% fasilitas di dalam kawasan, atau 37 fasilitas, dimiliki oleh masyarakat setempat. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa toko kelontong (19 buah), akomodasi/penginapan (4 buah), rumah makan/restoran (4 buah), dan toko cinderamata (4 buah). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung aktivitas pariwisata setempat melalui penyediaan fasilitas pendukung layanan wisata.

Masyarakat setempat yang sudah berpengalaman dalam penemuan benda cagar budaya akan menawarkan bantuan dalam penelitian kepada akademisi yang datang untuk meneliti dengan biaya tertentu. Atau juga turut membantu BPSMP Sangiran dalam proses ekskavasi temuan Cagar Budaya. Masyarakat setempat tidak sedikit yang bekerja di klaster-klaster museum sebagai tenaga teknis. Tenaga teknis yang dimaksud adalah sebagai pekerja di sektor wisata sebagai petugas parkir, petugas tiket, atau pemandu wisata. Masyarakat juga terlibat sebagai tenaga keamanan sebagai satpam di museum.

Meski masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terlibat secara pasif dalam hal pelestarian cagar budaya. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya aturan mengenai larangan memindahkan fosil dari tempatnya semula atau menjual fosil secara ilegal kepada masyarakat dari luar kawasan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah membuat seperangkat kebijakan, mulai dari *masterplan*, DED, RTRW, Perda tentang retribusi, dan SOP. Pemerintah juga melakukan pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan wisata dan pelestarian cagar budaya. Pembiayaan dua kegiatan tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Untuk pelestarian cagar budaya, pendanaan berasal dari Pusat (APBN), sementara dana untuk wisata berasal dari Pemerintah Daerah. Seluruh pendanaan berasal dari pemerintah dan tidak ada pendanaan yang berasal dari pihak swasta atau CSR.

Dalam pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat utamanya tentang pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat dan hasilnya dapat dilihat dengan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas toko cinderamata atau akomodasi. Sarana dan prasarana wisata disediakan pula oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Patroli keamanan dilakukan oleh pemerintah melalui kepolisian sektor setempat secara rutin. Perawatan cagar budaya dilakukan oleh juru pelihara yang dimiliki oleh Seksi Perlindungan BPSMP Sangiran. Promosi mengenai wisata sekaligus pelestarian cagar budaya terutama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemasangan papan-papan informasi di tempat umum dan pemasangan video di bandara. Penelitian untuk pengembangan nilai-nilai objek wisata berupa penggalian dan pengembangan pengetahuan tentang Situs Sangiran menjadi tanggung jawab Seksi Pengembangan BPSMP Sangiran yang bekerja sama dengan instansi lain maupun universitas.

Pihak swasta dapat terlibat sebagai pemberi dukungan dana (investasi) dan pendukung penyediaan sarana prasarana. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan swasta dalam investasi maupun dukungan penyediaan sarana prasarana dalam wisata dan pelestarian cagar budaya di Kawasan Sangiran.

VI. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa komponen peran wisata cagar budaya di Kawasan Sangiran adalah kurang sesuai. Lima dari enam komponen masih dalam kondisi kurang sesuai, sehingga memerlukan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaannya. Sementara satu komponen yang bernilai sesuai adalah komponen kebijakan, yang juga masih memerlukan evaluasi terutama dalam implementasi peraturan zonasi secara tegas agar dapat melindungi cagar budaya secara maksimal.

Untuk mencapai peran-peran wisata cagar budaya, khususnya dalam penyampaian nilai penting pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pelestarian kawasan, pengelolaan wisata dan pelestarian kawasan Sangiran tidak bisa dipisahkan antara satu klaster dengan klaster lainnya, antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Pengelolaan secara terpisah akan menyulitkan pengelolaan kawasan secara terpadu yang akan menghambat tercapainya peran-peran wisata cagar budaya di dalam kawasan. Pengelolaan ini juga harus diimbangi dengan langkah untuk memperjelas ranah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan wisata cagar budaya dan melakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat setempat mengenai urgensi cagar budaya agar tidak lagi terjadi penjualan barang temuan cagar budaya yang dijual kepada pihak di luar museum.

Oleh karena itu direkomendasikan penelitian selanjutnya bisa mengambil fokus pada ranah pelestarian cagar budaya yang dilakukan di Kawasan Sangiran yang belum dibahas dalam penelitian ini. Pariwisata yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan salah satu sarana yang digunakan Pemerintah untuk melestarikan kawasan cagar budaya melalui pemanfaatan

cagar budaya dalam bentuk pengembangan wisata cagar budaya agar nilai-nilai penting pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Narasumber yang disasar juga bisa lebih luas, seperti masyarakat yang secara tidak langsung turut terlibat dalam proses pelestarian kawasan cagar budaya Sangiran.

Rekomendasi penelitian yang kedua, selanjutnya juga bisa membahas mengenai kesesuaian guna lahan atau zonasi di Kawasan Sangiran. Mengingat zonasi di kawasan ini didasarkan pada jenis lapisan tanah yang diduga mengandung fosil atau pernah menjadi lokasi penemuan fosil, sehingga penentuan zonasinya berbeda dengan kawasan cagar budaya lainnya. Letak zonasi inti yang tersebar nyaris di seluruh kawasan pun turut mempengaruhi proses pembangunan, perubahan guna lahan, dan akses keluar masuk kawasan. Penelitian ini nantinya bisa menjadi salah satu masukan bagi Pemerintah dan pengelola (BPSMP Sangiran) apakah perlu ada penyesuaian aturan zonasi atau pembuatan kebijakan yang mendukung diterapkannya zonasi secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Budaya dan Pariwisata. 2007. *Pedoman Pengelolaan Koleksi Museum*.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, Muhammad. 2012. "Strategi Pengelolaan Situs Sangiran sebagai Warisan Dunia." *Jurnal Sangiran* (1): 1-13.
- Kementerian Pariwisata. 2009. *Bagaimana Mendirikan Sebuah Museum*.
- Mulyadi, Yadi. 2014. *Sosialisasi Undang-Undang tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.
- Neufert, Ernst and Peter Neufert. *Architect's Data*. Oxford Brookes University.
- Panglipur, Ratna Sri. 2012. "Pendekatan Masyarakat untuk Perencanaan Pariwisata Sangiran: Integrasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Pelestarian

Situs. *Jurnal Sangiran* (1) : 128-137.

Pedoman Teknis Kawasan Budidaya tahun 2007

Pendit, Nyoman S.. 2002. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata.

Peraturan Menteri PUPR No.01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 tentang Museum

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 13 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Petunjuk Teknis SPM PUPR tahun 2014

PP No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

RTRW Kabupaten Sragen tahun 2009-2029

Siswanto. 2007. *Jurnal Berkala Arkeologi tahun XXVII (1)*.

SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan

Soegiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan HRD*. Bandung: CV Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Suwantoro, Gamal. 2010. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

UURI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Warpani, Suwardjoko P.. 2007. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.

Yoeti, Oka A.. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.